

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abe, R. S., & Witasari, A. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur Pengukuran Ulang Tanah Sebagai Penyelesaian Sengketa Batas Kepemilikan Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.
- Absori, A. 2006. Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.
- Andreas, R., Adi, L. K., & Sulastuti, S. (2019). The Effect of Colonialism on Implementation of Agrarian Reform in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (2).
- Al-Shatibi. (2003). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* , Juz II. Dar al-Kutb al-'Ilmiyah. Beirut.
- Arianto, B. I., & Gunarto, G. (2020). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor BPN Kabupaten Grobogan. Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.
- Arifah, U., 2018. Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik, *PROSIDING SENASPOLHI*, 1(1).

Arifin, F. S. (2008). *Pembaruan Agraria Nasional (PAN) dengan Program Sertifikasi Tanah Melalui Prona Guna Menyukkseskan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Pematang (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).*

Asraf Wajdi Dususki at all. (2012). *Maqosid al Syariah: Masalahah And Corporate Social Responsibility. The American Journal Of Islamic Social Sciences. Vol 24 Issue 1.*

Bangsawan, M., Absori, S. H., & Hum, M. (2019). *Kebijakan Sertifikasi Tanah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*

Badruzaman, M. D. (1997). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Proyek Penulisan Karya Ilmiah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Republik Indonesia, Bekerja Sama, Penerbit Alumni.*

Bank, J. (1992). *The essence of total quality management* (pp. 171-81). Hemel Hempstead: Prentice Hall.

BPS. 2021. Kabupaten Grobogan dalam Angkat Tahun 2020.

Christiawan, R., 2018. *Urgensi Pendaftaran Tanah Lengkap (PTSL) di Kecamatan Sukajaya Kapupaten Bogor. Berdikari, 1(2).*

Fauzi, N., & Zakaria, R. Y. (2002). *Democratizing decentralization: Local initiatives from Indonesia. In Paper submitted for the International Association for the Study of Common Property 9th Biennial Conference, Zimbabwe.*

- Fisher, L. A., Kim, Y. S., Latifah, S., & Mukarom, M. (2017). Managing Forest Conflicts: Perspectives of Indonesia's Forest Management Unit Directors. *Forest and Society*, 1.
- G. Kartasaputra, 1991, *Hukum Tanah Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ginting, D. (2020). Policies on Prevention and Eradication of Land Mafia: Agrarian Reform in Indonesia. *Utopía Y Praxis Latinoamericana: Revista Internacional De Filosofía Iberoamericana Y Teoría Social*, 25 (2).
- Hanifah, N. I., & Ma'ruf, U. (2019). Responsibility Land Office of Semarang City In Terms Contained In Land Multiple Certificates. *Jurnal Akta*, 6(3), 415-424.
- Hans Kelsen. (1978). *Pure Theory of Law*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Hayat. (2015). Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Volume 2 Nomor 2.
- Haris, A. (2005). *Pengaruh Penatagunaan Tanah terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi, Perencanaan Pembangunan*.
- Handoko dalam Press, A. U. B. (2017). *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper 2017*. In *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper*.
- Hidayat, A. (2018). Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 1(1).

Hilaire. Nigel D. White. McCoubrey, 1999, Textbook and Jurisprudence, Blackstone Press Limited, London.

Imron Rosyadi, (2013). Pemikiran As-Syatibi Tentang Masalah Mursalah. Jurnal Profetika. Volume 14 Nomor 1.

Irawan, S. 1999. *Metode Penelitian Sosial, Suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya*. Remaja Rosdakarya.

Ismail, N. (2012). Arah Politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1).

Jacqueline, V. E. L., Zakaria, Y., & Bedner, A. (2017). Law – Making as a Strategy for Change: Indonesia’s New Village Law. Asian Journal of Law and Society, 4 (2).

Kurniawan, W. A., Setiowati, S., & Supriyanti, T. (2018). Ekspektasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Tunas Agraria, 1(1 Sept).

Kusumo, A. D. (2012). Proyek Operasi Nasional Agraria sebagai Upaya Tertib Hukum Pertanahan (Studi di Desa Kesugihan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap). Diponegoro Law Journal, 1(4).

Kodir, A., & Mushoffa, I. (2017). Islam, Agrarian Struggle, and Natural Resources: The Exertion of Front Nahdliyin for Sovereignty of Natural Resources Struggle Towards Socio-Ecological Crisis in Indonesia. KARSA: Journal of Social and Islamic Culture, 25 (1).

- Lee Peluso, N., Afiff, S., & Rachman, N. F. (2008). Claiming the grounds for reform: agrarian and environmental movements in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 8 (2-3).
- Mahathir, Y. (2011). Implementasi Azas Aman Pendaftaran Tanah dalam Penerbitan Sertifikat Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.
- Ma'ruf, U., & Wijaya, D. (2015). Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 299-309.
- Ma'ruf, U. (2006). Politik Hukum Hak Menguasai oleh Negara Terhadap Tanah. *Jurnal Hukum*, 16(3).
- Ma'ruf, U. (2010). Pelembagaan Hak Tanggungan Sebagai Hak Jaminan Atas Tanah. *Jurnal Hukum*, 15(1).
- Mezak, M. H. 2006. Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review: Fakultass Hukum Universitas Harapan*, 5 (3).
- Mohammed Khaleed Masud, (1989), *Islamic legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al Shatibi's Life And Thought*. International Islamic Publishers. Delhi.
- Mujiburohman, D.A., (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4 (1).

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nurhayati, N. 2010. *Pelaksanaan penyusunan program legislasi daerah Kota Surakarta untuk menunjang fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Nurhayati, N., & Bangsawan, M. I. (2019). The Sustainable Development Licensing Policy of Creative Industry In The Era Of Asean Economic Community (AEC) In Surakarta, Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7 (3).
- Purwanto, Heri. (2013). Local to global; How Serikat Petani Indonesia has accelerated the movement for agrarian reform. *La Via Campesina's Open Book: Celebrating 20 Years of Struggle and Hope*.
- Purwanto, H. (2013). Local to global; How Serikat Petani Indonesia has accelerated the movement for agrarian reform. *La Via Campesina's Open Book: Celebrating 20 Years of Struggle and Hope*, 20.
- Rakasiwi, S., & Ma'ruf, U. (2020). Peran Kepala Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang Dalam Penerbitan Sertifikat Atas Tanah. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Razuni, G., & Pramanti, A. (2020). No Agrarian Reform: Revolutive Without Revolution?. *Jurnal Partisipatoris*, 2 (1).

- Rejkiningsih, T., Muryani, C., & Lukitasari, D. (2019). Study of The History and Dynamics of the Agrarian Policy in Transforming the Indonesia's Agrarian Reform. *Yustisia Jurnal Hukum*, 8 (2).
- Rianto, A. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Rosset, Peter. (2006). Moving forward: agrarian reform as part of food sovereignty. *Promised Land: Competing visions of agrarian reform*.
- Rosset, P., Patel, R., & Courville, M. (Eds.). (2006). *Promised land: competing visions of agrarian reform*. Food First Books.
- Ruslan, R., & Djauhari, D. 2017, Implementation of Acceleration Systematic Land Registration Full In Humbang Hasundutan District, The 2nd Proceeding "Indonesia Clean of Corruption in 2020".
- Santosa, S., Wicaksono, A., & Nugroho, R. (2019). Multi-Role Collaboration of Ministries and Institutions in the Implementation of Agrarian Reform in Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5 (3).
- Santoso Urip. 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setyani, A. N., & Suwondo, D. (2020). Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kabupaten Demak. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Sembiring Julius, 2016, *Tanah Negara*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Sianturi, R. E. Y, (2018). Politik Pembangunan Agraria Rejim Jokowi-Jusuf Kalla (Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial), Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.
- Sidik Tono. (2005). Penelitian dan Pengkajian Teori hukum Islam Menurut Al Syatibi, Jurnal Muwardi, Edisi XVIII.
- Simbolon, L. A. (2017). Gagalnya Perlindungan Anak sebagai Salah Satu Bagian dari Hak Asasi Manusia oleh Orang Tua Ditinjau dari Mazhab Utilitarianisme. Jurnal Yuridis, 3(2), 75-88.
- Soehendera Djaka, 2010. Sertifikat Tanah dan Orang Miskin: Pelaksanaan Proyek Ajudikasi di Kampung Rawa Jakarta, Jakarta: HuMa – Jakarta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2007. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum.
- Soerjono dan Abdurrahman, 2003. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum dan Politik Agraria, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sudjana, S. (2019). Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah), 2(1).
- Sulistiyah, S., & Ma'ruf, U. (2019). Government Policy to Accelerating Legal Certainty of Land Through Complete Systematic Land Registration

(PTSL)(Studies in Kendal District Land Office). *Jurnal Daulat Hukum*, 2(1), 31-38.

Suroso , 2011 , Pengantar Ilmu Hukum , Pt. Sinar Grafika , Jakarta.

Suwondo, D., & Saputra, I. (2019). Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum*, 35 (2).

Tjondronegoro, S. M. (2007). A Brief Quarter Century Overview of Indonesia's Agrarian Policies. In " Land and Household Economy 1970-2005: Changing Road for Poverty Reduction" National Seminar. Indonesian Center for Agricultural Socioeconomic and Policy Studies.

Widodo, S. (2017). A Critical Review of Indonesia's Agrarian Reform Policy. *Journal of Regional and City Planning*, 28 (3).

Wicaksono, A. and Purbawa, Y., 2018. Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 Juta Hektar Tanah Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1).

Winoto, J. (2009). Taking Land Policy and Administration in Indonesia to the Next Stage and National Land Agency's Strategic Plan. In Workshop in International Federation of Surveyors' Forum, Washington DC.

Wulan, D. R. (2006). Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Kabupaten Karanganyar (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Internet

Ekon-Go, 2021, Program Prioritas 31 Reforma Agraria, (online) (<http://kinerja.ekon.go.id/berita/detail/program-prioritas-31-reforma-agraria>, diakses pada 11 Februari 2021).

Inspektorat, 2020. Pembinaan PTSL pada Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan (online) (<https://inspektorat.grobogan.go.id/info/berita/108-pembinaan-ptsl-pada-desa-putatsari-kec-grobogan>, di akses pada 8 Juli 2021)

Metrokaltara, 2021. <https://www.Metrokaltara.com/Kepastian-Hukum> diakses pada tanggal 19 April 2021

Ngobrol Hukum, 2021. [https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-\(dalam\)-hukum/ngobrolin-hukum](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-(dalam)-hukum/ngobrolin-hukum) diakses pada tanggal 18 April 2021

Prasetyo, F. (2019). The struggle for land rights: Indonesian (Urban) Agrarian Reform and (Against) the Global Land Forum in Bandung. <https://platypus1917.org/2019/07/02/the-struggle-for-land-rights/>.

Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2021, Prona Bukan Bagi – Bagi Sertifikat, (online), (<https://jatengprov.go.id/publik/prona-bukan-bagi-bagi-sertifikat/>), diakses pada tanggal 05 April 2021).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2018, Presiden Jokowi Teken Inpres Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, (online)

(<http://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021)

Silviana, A. (2018). Politik Hukum Pertanahan Prismatic Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam Kepemilikan Tanah, Online, (<http://eprints.undip.ac.id/61265>) diakses pada tanggal 1 Mei 2021)

Universitas Udayana, 2021. <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1205315027-3-BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 18 April 2021.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021. <http://repository.uin.suska.ac.id/pengertian-efektifitas-telaahpustaka> diakses 18 April 2021

Universitas Bina Sarana Informatika, 2021. <https://repository.bsi.ac.id/pengertian-pelaksanaan> diakses pada tanggal 19 April 2021.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021. <http://e-jurnal.uajy.ac.id/pengertian-pelaksanaan> diakses pada tanggal 19 April 2021.

Universitas Medan Area, 2021. <http://repository.uma.ac.id/uraian-teori-teori-kepastian-hukum> diakses pada tanggal 20 April 2021

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Ketetapan MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Indonesia, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok – Pokok Agraria

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2009 Tentang Badan Pertanahan
Nasional

Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013.

Indonesia, Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan
Pertanahan Nasional , Menteri Dalam Negeri , Menteri Desa ,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor :
25/SKB/V/2017 , nomor : 509-3167A tahun 2017 , nomor : 34 Tahun
2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.